BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Perompakan yang terjadi di setiap daerah laut yang ada diseluruh dunia saat ini sudah menjadi salah satu isu penting dalam dunia internasional. Perairan yang merupakan salah satu zona penting bagi setiap Negara akan selalu menjadi permasalahan yang dialami setiap Negara. Batas wilayah perairan adalah bagian penting dari setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan suatu Negara baik dalam hal kerjasama maupun konflik. Perompakan telah membuat setiap Negara memiliki pertahanan untuk menjaga stabilitas keamanan wilayahnya agar tidak menjadi sasaran perompakan yang semakin sulit untuk diatasi.

Dari sekian banyaknya selat yang memiliki kepentingan dalam setiap Negara yang melewatinya, selat malaka merupakan sebuah selat yang konvensional.Selat ini merupakan jalur perdagangan Internasional yang sangat berpengaruh untuk Negara-negara yang melewati lintas selat malaka. Karena letaknya yang strategis, selat ini pun menjadi sasaran para perompak untuk mengambil keutungan baik perorangan maupun keuntungan dari suatu Negara.Perompakan yang dilakukan tentu sangat merugikan kapal-kapal yang melewati selat malaka yang membawa sumber daya yang hendak dijual ataupun dibeli melewati jalur laut.

UPN "VETERAN" JAKARTA

Gambar 1: Peta Selat Malaka

source 1: WordPress.com

Diawal tahun 1990an angka penyerangan pembajakan mengalami peningkatan di wilayah Asia Tenggara. Peningkatan pembajakan di Asia Tenggara pada 1990-an dipicu oleh pertumbuhan perdagangan internasional, terutama perdagangan yang berlayar di daerah laut. (Wombwell, A. James, 2010. "*The Long War Against Piracy: Historical Trends*". Combat Studies Institute Press, US Army Combined Arms Center Fort Leavenworth, Kansas, hlm.132).

Kekuatan militer yang ada dalam kerjasama MSSP menggiring semangat yang layak untuk mengamankan selat malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional yang dilewati oleh berbagai jenis kapal laut. Walaupun keadaannya berada dilaut, namun militer darat berperan aktif dalam menetap di pos-pos penjagaan dan siap siaga bila para perompak hingga memasuki daratan demi melancarkan aksinya. Militer yang bertugas di udara merupaka satuan khusus yang

dibentuk dalam *EiS (Eyes In The sky)* untuk memantau keamanan dan membantu militer laut dalam mengamankan dan beraksi diatas udara.

Grafik 1: Jumlah penyerangan pembajakan di Selat Malaka periode tahun 1995-2000

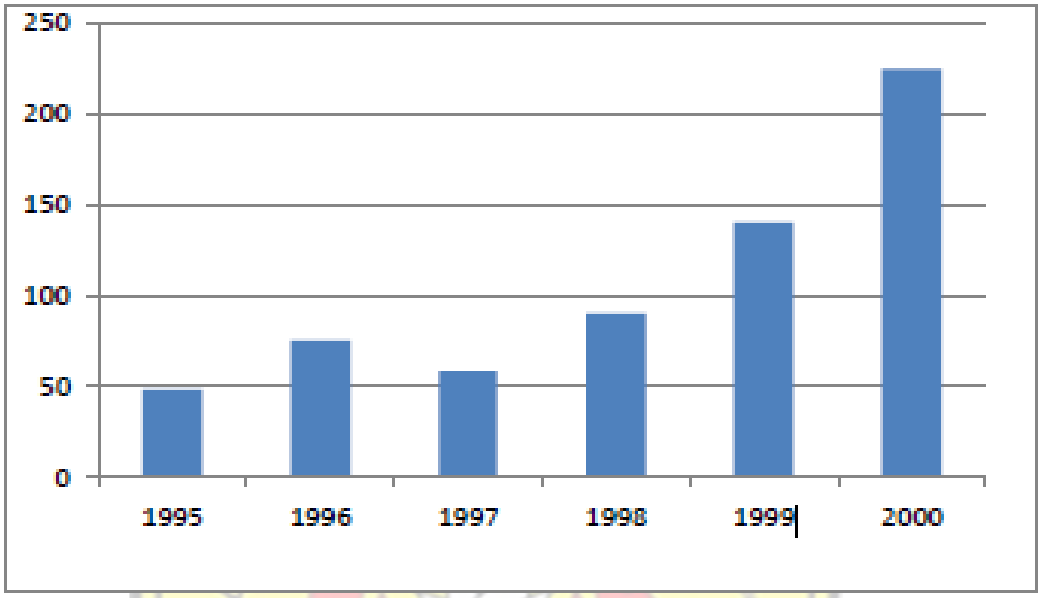

Source 2: Piracy and Armed Robbery Against Ships Annual Report www.icc-ccs.org

Banyaknya kasus perompakan yang semakin aktif dilakukan oleh para perompak membuat badan keamanan harus memiliki strategi yang benar dan tingkat ke- hati-hati an yang besar dalam menyelesaikannya. Negara-Negara yang memiliki batas laut langsung tentu akan memiliki permasalahan tersebut, seperti Malaysia Indonesia, Thailand dan Singapura. Hal ini membuat keempat Negara yang tergabung dalam ASEAN dan berbatasan langsung akhirnya membuat suatu lembaga*Malacca strait sea patrol(MSSP)*. Demi menjaga keamanan akan aksi kejahatan di Selat Malaka tersebut, maka perlu adanya suatu konsep keamanan dan kerjasama dari *littoral states*. Dengan terbentuknya kerjasama MSSP ini dibentuk, tingkat pembajakan yang terjadi di Selat Malaka cenderung mengalami penurunan hinggamencapai angka nol pada tahun 2010.Penurunan ini terjadi seiring dengan

UPN "VETERAN" JAKARTA

semakin intensifnya kegiatan patroli yang dilakukan oleh negara-negara MSSP. Seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2: Jumlah Pembajakan Setelah Terbentuknya Malacca strait sea patrol(MSSP)

Tahun 2004-2010

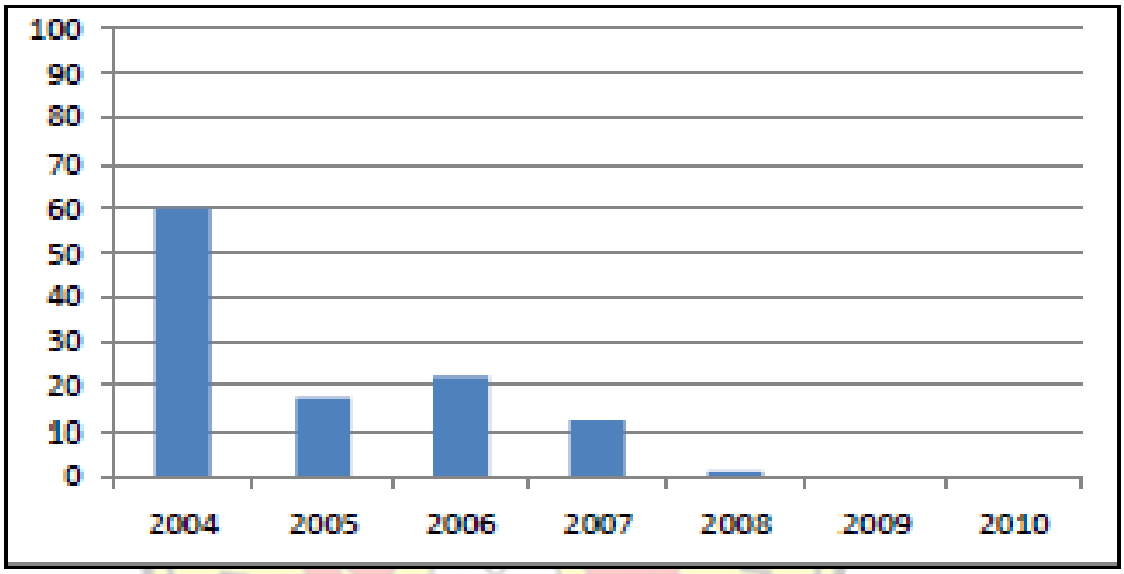

Source 3: Piracy and Armed Robbery Against Ships Annual Report www.icc-ccs.org

Dalam kurun waktu yang cukup panjang, jenis-jenis kapal yang mengalami penyerangan juga tidak hanya satu jenis. Dari data yang diperoleh, kapal-kapal yang berlayar di laut dengan kepentingannya sendiri ataupun kepentingan Negara tidak selamanya aman dalam pantauan polisi patrol laut. Kebanyakan dari para perompak menggunakan kapal kecil dan cepat untuk melancarkan aksinya. Berikut adalah data kapal-kapal yang telah mengalami kasus pembajakan dan perompakan bersenjata dilaut sesuai dengan periode yang akan dibahas oleh penulis.

UPN "VETERAN" JAKARTA

Gambar 2: jenis kapal yang mengalami penyerangan

Type	2013	2014	2015	2016	2017
Bulk Carrier	31	22	45	20	18
Cable Ship			1		
Cement Carrier					1
Container	17	10	13	8	7
Dhow	1				2
Dredger				1	
General Cargo	14	11	8	3	7
Heavy Lift Vessel				1	
Hopper Dredger			1		
Naval Auxiliary Vsl					
Offshore Processing Vsl		1			
Offshore Support Vsl				1	1
Ore Carrier				1	
Passenger			1		
Pipe Layer / Barge			1	1	
Refrigerated	2		2		1
Research Ship				2	2
RORO	1	2			
Supply Vsl	5	2	2	2	5
Tanker Asphalt/Bitumen	1	1			1
Tanker Bunkering		1	1		1
Tanker Chem / Prod	37	40	34	35	26
Tanker Crude Oil	16	16	10	7	5
Tanker FPSO / FSO			2		
Tanker LNG				1	2
Tanker LPG	4	5	3	5	4
Trawler / Fishing	2	2	1		1
Tug / Offshore Tug	7	2	5	8	3
Vehicle Carrier		1	1	2	
Wood Chips Carrier			2		
Yacht			1		
Sub total	**138**	**116**	**134**	**98**	**87**
Total at year end	**264**	**245**	**246**	**191**	

source 4: Piracy and Armed Robbery Against Ships Annual Report 2017 www.icc-ccs.org

Konsep keamanan (*security*) yang ada selama ini telah berkembang sejak pasca perang dingin dan berlanjut pada era globalisasi dewasa ini.Konsep ini telah diperluas dan tidak hanya terfokus pada hal-hal yang bersifat militeristik, tetapi telah berkembang mengarah pada berbagai aspek seperti perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, perluasan perdagangan dan investasi, pemberantasan kejahatan internasional, atau perdagangan barang terlarang. Dalam dunia kemaritiman, keamanan maritim juga telah meluas tidak hanya konsep pertahanan laut terhadap ancaman militer dari Negara lain tetapi juga termasuk pertahanan terhadap efektivitas keamanan di dalam Negara itu sendiri.

Dalam kehidupan bertetangga dan tergabung dunia internasional tentu diplomasi dan kerjasama merupakan hal yang wajib dilakukan dengan Negara-negara tetangga agar terciptanya Keharmonisan. Salah satu bentuk kerja sama dalam agenda pengamanan Selat Malaka adalah *Malsindo Trilateral Coordinated Patrol* .Dibentuk di Batam, pada tanggal 20 Juli 2004. Di mana kerja sama ini berupa kegiatan patroli terkoordinasi tiga negara dalam kawasan Selat Malaka. (Rodi Suprasojo, Journal Defence Cooperation Agreement (DCA) antara pemerintah Indonesia-Singapura, (universitas Indonesia,2006) (Rodi Suprasojo : 2006).

Namun, pada bulan-bulan berikutnya *Malsindo Trilateral Coordinated Patrol* mengalami kesulitan setelah terjadinya sebuah serangan terhadap kapal tunda milik Jepang, Idaten pada bulan Maret 2005, Tokyo mengusulkan untuk mengirimkan Garda Pantai Jepang untuk membantu polisi selat - yang ditolak Kuala Lumpur. Yang lebih mengerikan, perbedaan intra-regional tersebut mengancam untuk mengangkat kepala

UPN "VETERAN" JAKARTA

mereka lagi ketika Singapura berpendapat bahwa semua pemangku kepentingan harus berkontribusi pada keamanan Selat Malaka.

Secara kebetulan, selama Dialog Shangri-La di tahun 2005, Indonesia, Malaysia dan Singapura mencapai sebuah konsensus bahwa negara-negara pesisir menjadi penanggungjawab utama dalam mengamankan selat tersebut, dan bahwa negara pengguna dan masyarakat internasional memiliki peran penting atas dasar penghormatan terhadap kedaulatan nasional dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Khususnya, pada kesempatan itu, Menteri Pertahanan Malaysia Najib Tun Razak juga mengusulkan komponen patroli udara yang diberi nama "Eyes-in-the-Sky" (EiS) untuk melengkapi *Malsindo Trilateral Coordinated Patrol*.

Selanjutnya sebuah kapal tanker produk Thailand diserang di Selat Malaka, hal ini menyebabkan berbagai perwakilan industri pelayaran untuk memandang *Malsindo Trilateral Coordinated Patrol* ini tidak efektif. Kemudian tindakan lebih lanjut telah diperdebatkan di Pertemuan Jakarta di Selat Malaka dan Singapura: Meningkatkan Keselamatan, Keamanan dan Perlindungan Lingkungan pada awal September 2005, ketika Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand berjanji untuk meningkatkan keamanan selat. Khususnya, Jakarta mengusulkan Prakarsa Keamanan Selat Malaka (MSSI) - sebuah pendekatan komprehensif yang terdiri dari patroli terkoordinasi dan pembagian intelijen.

Dengan mengajukan proposal MSSI di Indonesia pada akhir tahun 2005, Kerangka Acuan dan Standard Operating Procedures ditandatangani oleh kepala

UPN "VETERAN" JAKARTA

militer daerah Selat Malaka pada bulan April 2006. Patroli Selat Malaka (MSP) diformalkan, yang terdiri dari Patroli Selat Malaka (dahulu MALSINDO), EiS dan Kelompok Pertukaran Intelijen.Komite Koordinasi Bersama juga dibentuk dengan mengawasi patroli dan memfasilitasi komunikasi, pertukaran intelijen dan koordinasi.

Malacca strait sea patrol ini akhirnya beranggotakan MIST: Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand. Kunci keterlibatan internasional ini adalah pembentukan Kelompok Pakar Teknis Tripartit baru untuk Keamanan Maritim. Selain itu, kebutuhan untuk melibatkan negara-negara yang berbatasan dengan "corong" yang mengarah ke kedua selat, termasuk Negara Thailand. Bertepatan dengan "pertemuan temu" ini adalah pengumuman resmi yang menciptakan EiS - menunjukkan keseriusan negara-negara littoral tentang mengamankan Selat Malaka, seperti yang ditunjukkan oleh pejabat militer Indonesia.

Kepentingan yang membuat *MSSP* ini dibentuk adalah demi menjaga keamanan wilayah perbatasan dan suatu kerjasama yang telah dibentuk oleh MIST untuk mengamankan potensi sumber daya laut dan menanggulangi kasus perompakan yang kerap terjadi didalam bentangan laut terlebih selat yang menjadi kawasan konvensional yaitu selat malaka. Focusutama pembentukan lembaga ini antara lain, Selat Malaka mempunyai peluang yang positif namun menyimpan resiko tinggi bagi perdagangan regional dan internasional. Polusi, perompakan dan konflik internasional di khawatirkan merupakan ancaman utama yang dapat mengganggu perdagangan dunia dan menimbulkan kerugian yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi ekonomi dunia.Bila sebuah tanker minyak diserang bajak laut, lalu tenggelam dan menyebabkan

UPN "VETERAN" JAKARTA

tumpahan minyak serta menghalangi kapal-kapal lain yang melewati jalur sempit, kerugian ekonomi dan lingkungan akan dengan cepat menimbulkan biaya tinggi dan dampak berat yang tidak bisa dilihat sebelumnya. Contohnya, kerugian bagi nelayan-nelayan setempat, polusi di pesisir pantai, penurunan perdagangan lokal dan turisme. Dalam jangka waktu singkat, kerugian ekonomi mungkin akan mencapai milyaran Euro.

Indonesia memiliki keyakinan untuk ikut serta dalam lembaga ini karena selat malaka merupakan selat yang terbentang di wilayah perairan Indonesia itu sendiri dan MSSP merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Negara-negara yang memiliki kepemilikan *territorial* selat ini. Indonesia tentu menganggap lembaga ini penting untuk diikutsertakan mengingat banyaknya kasus perompakan yang terjadi dan merugikan Negara, selain itu kerjasama yang terjalin tentu memiliki kebaikan tersendiri bagi kepentingan dalam berbagai bidang.

Malacca strait sea patrol telah memberikan peluang dan aksi nyata pada kasus-kasus yang terjadi di selat malaka. Terhitung sejak awal pembentukan lembaga ini, telah banyak data perompakan yang dilaporkan hingga tahun 2017. Menindak lanjuti penelitian sebelumnya, penulis akan membahas kasus-kasus yang terjadi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yaitu 2014-2017. Kerjasama yang terjalin antara 4 (empat) Negara terkait ini membuahkan hasil yang memang sebelumnya mungkin masih terhitung belum maksimal.Hal ini disebabkan karena dapat dikatakan hanya Indonesia yang merealisasikan bentuk kepeduliannya terhadap selat malaka, karena Indonesia merasa bahwa selat malaka merupakan selat yang paling dekat dengan

UPN "VETERAN" JAKARTA

daerah kekuasaan laut Negaranya.Hal ini dapat dirujuk dari undang-undang hukum Internasional dan peraturan pemerintah Indonesia sendiri yang disebut sebagai Lintas Damai dan kewajiban Negara Pantai.(Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, April 2011 hal 23).

Tabel 1: Data Perompakan periode tahun 2014-2017

	Location	2013	2014	2015	2016	2017
SE ASIA	Indonesia	48	47	54	24	19
	Malacca Straits	1	1	3		
	Malaysia	3	9	11	4	3
	Philippines	1	2	4	5	15
	Singapore Straits	4	6	6		1
	Thailand			1		

Source 5: Piracy and Armed Robbery Against Ships Annual Report www.icc-ccs.org

Setiap Negara mempunyai hak lintas damai atau *right innocent passage* sesuai dengan ketentuan.(KHL'17 1982). Lintas damai adalah sepanjang tidak merugikan perdamaian, ketertiban atau keamanan Negara pantai.Lintas damai tersebut harus sesuai dengan konvesi ini dan peraturan hukum laut lainnya. (pasal 19 ayat 1 KHL 1982). Sebelum konvensi Hukum Laut Internasional 1982, hak lintas damai sudah diatur oleh pemerintah dalam peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1962 tentang lintas damai dalam peraitan Indonesia, yaitu:

- Semua pelayaran dari laut lepas ke suatu pelabuhan Indonesia.
- Semua pelayaran dari suatu pelabuhan Indonesia menuju laut lepas untuk tujuan-tujuan damai.

UPN "VETERAN" JAKARTA

- Semua pelayaran dari dan laut lepas dengan melintasi perairan Indonesia.

  (Dr. Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam era Dinamika Global, Bandung: Alumni. 2005, hal 384)

Dengan adanya pernyataan seperti diatas, penulis bermaksud memaparkan lebih lanjut perkembangan atas apa saja yang telah dilakukan oleh *Malacca strait sea patrol*dalam menanggulangi kasus-kasus perompakan yang terjadi sepanjang tahun 2014-2017.

I.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya permasalahan perompakan yang kian terjadi dan terbentuklah suatu organisasi Internasional untuk menanggulangi dan menangani berbagai masalah yang terjadi, belum lagi pernyataan yang membuat Indonesia menjadi satu Negara yang paling merealisasikan aksi nyata dalam isu perompakan di selat malaka, munculah pertanyaan penelitian yaitu, **Bagaimana kerjasama MSSP dalam menangani kasus perompakan yang terjadi di teritori selat malaka pada tahun 2014-2017?**

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan apa yang telah dilakukan MSSP dalam menangani berbagai kasus yang terjadi di selat malaka terutama perompakan dalam periode 2014-2017.

UPN "VETERAN" JAKARTA

2. Untuk menganalisa bentuk kerjasama yang dilakukan MSSP dalam mengatasi kasus perompakan di selat malaka.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Dalam hal akademis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan manfaat untuk masyarakat dalam kajian ilmiah atupun akademis. Juga dapat menambah informasi mengenai apa itu *Malacca strait sea patrol*dan perannya dalam menangani kasus-kasus perompakan di selat malaka.
2. Secara praktis, besar harapan bahwa penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu Hubungan Internasional mengenai permasalahan perompakan dan peran MSSP sebagai lembaga kerjasama Internasional yang bertempat di Selat Malaka.

I.5 Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan yang diharapkan memberikan pemahaman mengenai penelitian ini, penulis membagi penelitian ini ke dalam 6 (enam) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis merangkum hal-hal yang menjadi latar belakang permasalahan dalam isu yang diangkat hingga terbentuklah sebuah pertanyaan penelitian yang kemudian menjadi rumusan masalah. Dalam bab ini juga

UPN "VETERAN" JAKARTA

dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian kemudian merumuskan sistematika penulisan skripsi yang dibuat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan ketiga literature yang digunakan sebagai tinjauan dalam pembuatan skripsi. Penulis juga menjabarkan kerangka teori yang mencakup konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan untuk mendukung skripsi ini, selanjutnya, dituliskan juga tentang alur pemikiran serta asumsi yang kemudian muncul.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data yag digunakan dalam pembuatan skripsi ini. Penulis juga akan menuliskan waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV PEROMPAKAN DI SELAT MALAKA

Dalam bab ini, penulis akan menganalisa keberadaan selat malaka danmemaparkan data-data tentang apa saja yang telah terjadi di selat malaka beserta jenis senjata apa yang dipakai oleh para perompak dalam melancarkan aksinya.

BAB V KERJASAMA MALACCASTRAITS SEA PATROL DALAM MENANGANI KASUS PEROMPAKAN DI SELAT MALAKA

UPN "VETERAN" JAKARTA

Dalam bab ini, penulis akanmenjelaskan dampak perompakan di selat malaka bagi negara-negara lain terkait kepentingan nasional yang memicu adanya konflik dan kebijakan dari sisi masing-masing Negara terkait.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari sekuruh latar belakang, data dan penanganan koknflik yang terjadi. Diharapkan penulisan ini dapat menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UPN "VETERAN" JAKARTA